

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM JEMPUT BOLA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DALAM KEPEMILIKAN KTP-EL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RACHITA AMELIA

KTP elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh akses terhadap layanan publik dan bantuan sosial. Di Kota Bandar Lampung, dari total 777.087 penduduk yang wajib memiliki KTP, masih terdapat 1,3% atau 10.191 orang yang belum memiliki KTP-el, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Hal tersebut karena penyandang disabilitas dan lansia kerap mengalami hambatan fisik dan aksesibilitas dalam melakukan perekaman KTP-el secara mandiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program Jemput Bola, yaitu pelayanan perekaman KTP-el secara langsung ke lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Jemput Bola serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III digunakan sebagai pisau analisis, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurang optimalnya komunikasi, tidak adanya petugas yang terampil dalam bahasa isyarat, sarana prasarana yang belum memadai, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kesimpulannya, meskipun program Jemput Bola telah membantu sebagian kelompok rentan dalam memperoleh KTP-el, pelaksanaannya belum berjalan optimal dan memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, kapasitas sumber daya, serta dukungan teknis.

Kata Kunci: Implementasi Program, Jemput Bola, Disabilitas, Lansia, Kepemilikan KTP-el

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE JEMPUT BOLA PROGRAM FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND THE ELDERLY IN THE OWNERSHIP OF THE ELECTRONIC ID CARD (KTP-EL) IN BANDAR LAMPUNG CITY

BY

RACHITA AMELIA

The electronic ID card (KTP-el) is an essential identity document for every Indonesian citizen to access public services and social assistance. In Bandar Lampung City, out of a total of 777,087 residents required to have an ID card, 1.3% or 10,191 people still do not possess a KTP-el, including persons with disabilities and the elderly. This is largely due to the physical and accessibility barriers they face in recording their data independently. To address this issue, the Bandar Lampung City Government, through the Department of Population and Civil Registration, implemented the Jemput Bola program, which involves direct, on-site KTP-el registration services. This study aims to examine the implementation of the Jemput Bola program and identify the inhibiting factors in its execution in Bandar Lampung. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews and documentation. The study applies George C. Edward III's policy implementation theory, which includes the indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the program still faces several challenges, such as suboptimal communication, the absence of sign language-skilled officers, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of a Standard Operating Procedure (SOP). In conclusion, while the Jemput Bola program has supported some vulnerable groups in obtaining a KTP-el, its implementation remains suboptimal and requires improvements in coordination, resource capacity, and technical support.

Keywords: Program Implementation, Jemput Bola, Persons with Disabilities, Older Adults, Electronic ID Card (KTP-el) Ownership